

Judul : Penguatan koperasi Merah Putih, anggarannya ditambah Rp 8,85 T, layakkah?
Tanggal : Selasa, 09 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Penguatan Koperasi Merah Putih Anggarannya Ditambah Rp 7,85 T, Layakkah?

Di saat Pemerintah melakukan efisiensi anggaran, berbagai kementerian mengajukan penambahan anggaran ke DPR. Termasuk Kementerian Koperasi (Kemkop).
Kemarin, Kemkop menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Agendanya membahas mengenai anggaran 2026.
Kemkop mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun. Tujuannya, untuk mempercepat penguatan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Budi Arie Setiadi yang pada saat RDP masih berstatus Menteri Koperasi menuntutkan anggaran sebesar Rp7,85 triliun ini akan digunakan untuk kepentingan Kodes Merah Putih, yang terdiri dari dukungan manajemen Rp514,12 miliar, program perkoperasian Rp2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp4,52 triliun.
Secara rinci, anggaran yang diajukan akan dialokasikan untuk 10 program utama guna memperkuat koperasi.
Program pertama, pengelolaan kelembagaan dan tata kelola, mendapat Rp210 miliar untuk meningkatkan administrasi dan tata kelola koperasi. Kedua, transformasi ekosistem digital sebesar

Rp480 miliar dialokasikan untuk digitalisasi koperasi secara menyeluruh.
Ketiga, pengembangan usaha koperasi dengan anggaran Rp299 miliar bertujuan agar KDKMP dapat menjalin kemitraan dan terintegrasi dalam ekosistem nasional. Keempat, peningkatan daya saing sebesar Rp296 miliar berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, produk, dan layanan koperasi.
Kelima, penguatan sektor keuangan sebesar Rp184 miliar digunakan untuk pelatihan manajemen keuangan dan penataan usaha simpan pinjam. Keenam, pengawasan koperasi sebesar Rp234 miliar akan mendorong pengawasan berbasis anggota. Ketujuh, pengembangan SDM dan koperasi sebesar Rp598 miliar, dan kedelapan, penguatan data dan informasi sebesar Rp460 miliar.
Terakhir, anggaran terbesar, yaitu Rp4,5 triliun dialokasikan untuk dukungan pemberdayaan koperasi di daerah melalui dana dekonsentrasi. Dana ini akan digunakan untuk menyiapkan manajer, business assistant, dan project management officer guna memastikan operasional KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Rp50 miliar akan diberikan sebagai dukungan untuk Dewan Koperasi Indonesia untuk menggerakkan gerakan koperasi di seluruh tanah air.
Sedangkan pagu anggaran Kemkop pada 2026 adalah Rp937 miliar. Dana itu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp313,25 miliar dan program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar. Bagaimana respon DPR dan praktisi koperasi mengenai penambahan anggaran sebesar Rp7,85 triliun, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mendukung penambahan anggaran tersebut. "Jangankan 7,8 triliun, 10 triliun pun saya setuju," kata Herman.
Sementara, CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation), Suroto meminta agar penambahan anggaran untuk Koperasi Merah Putih ditinjau ulang. Baginya, Koperasi Merah Putih dari awal sudah salah konsep. "Ditunda dulu," pintanya. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Herman Khaeron dan Suroto terkait dengan penambahan anggaran sebesar 7,85 triliun untuk penguatan Koperasi Merah Putih, berikut wawancaranya.

SUROTO
CEO INKUR Federation

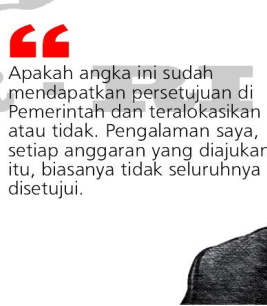
Dari Awal Sudah Salah Konsep, Tunda Dulu



“Kan sudah jelas, Koperasi Desa Merah Putih ini kan salah konsep. Seharusnya diperbaiki dulu konsepnya, bukan malah digelontorin anggaran. Nanti ujung-ujungnya berkasus.

HERMAN KHAERON
Anggota Komisi VI DPR

Fraksi Demokrat Dukung Penambahan Anggaran



“Apakah angka ini sudah mendapatkan persetujuan di Pemerintah dan teralokasikan atau tidak. Pengalaman saya, setiap anggaran yang diajukan itu, biasanya tidak seluruhnya disetujui.

Apa pandangan Anda mengenai keinginan Kemkop yang meminta tambahan anggaran 7,85 triliun untuk memperkuat Koperasi Merah Putih?
Menurut saya, prinsip anggaran itu kan budget follow the program. Bukan program follow the budget, gitu.
Jadi, ide gagasan yang ada di Kemkop untuk memajukan koperasi itu apa saja. Selama ini saya lihat nggak ada ide-ide pembaharuan untuk mengembangkan koperasi.
Saya melihat Kemkop nggak punya ide, kecuali hanya menjadikan kementerian ini sebagai makelar proyek saja.

Seal penambahan anggaran 7,85 triliun untuk Koperasi Merah Putih. Bagaimana?
Kan sudah jelas, Koperasi Desa Merah Putih ini kan salah konsep. Seharusnya diperbaiki dulu konsepnya, bukan malah digelontorin anggaran. Nanti ujung-ujungnya berkasus.
Mau minta anggaran berapa pun percuma, karena hanya akan memperkaya segelintir makelar proyek.
Lalu, apa saran Anda. Apakah penambahan untuk Koperasi Merah Putih ditunda atau minta dibatalkan?
Ya, ditunda dulu saja, sambil pemerintah membuat koperasi diag-

nostik, diagnosis kebijakan koperasi dulu.
Misalnya, kenapa koperasi di Indonesia selama ini kendil dan tidak berkembang dengan baik. Itu perlu didiagnosis, selama ini kita sibuk bikin program, tapi tidak pernah mengevaluasi program kan.
Nah, setelah diagnosis akan diketahui, sebenarnya apa kebutuhan koperasi di daerah. Kalau memang dibutuhkan pendanaan, pendanaan untuk apa saja.
Kalau pendanaan yang gak jelas dan hanya pengen meningkatkan jumlah pendanaan, mau Koperasi Desa Merah Putih atau koperasi apapun hanya akan buang-buang anggaran saja. ■ REN

Kemarin, Kemkop meminta tambahan anggaran sebesar 7,85 triliun untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana tanggapan Anda?
Untuk memperkuat terhadap arah dan tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, saya mendukung. Jangankan 7,8 triliun, 10 triliun pun saya setuju.
Tapi, apakah angka ini sudah mendapatkan persetujuan di Pemerintah dan teralokasikan atau tidak. Pengalaman saya, setiap anggaran yang diajukan itu, biasanya tidak seluruhnya disetujui.
Nah, dari pagu yang dialokasikan Pemerintah untuk Koperasi Merah

Putih, berapa?
Realitasnya, Kemkop meminta anggaran sebesar 7,85 triliun dan ternyata Pemerintah hanya menyalurkan anggaran sebesar 900 miliar. Jadi, dari data yang diterima, pagu anggarannya sebesar 900 miliar lebih untuk Kemkop dalam hal memperkuat Koperasi Merah Putih.
Apakah dengan pagu Rp 900 miliar lebih ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperkuat Koperasi Desa Merah Putih?
Saya belum bisa dijawab, karena memang semuanya sangat bergantung kepada penambahan anggaran. Oleh karenanya, diharapkan Pemerintah betul-betul mengalokasikan dana jika

Koperasi Desa Merah Putih ini mau jalan. Penambahan anggaran semestinya sesuai dengan arahan Presiden. Dan Presiden telah menyampaikan mendukung Koperasi Merah Putih.
Pendapat dari Fraksi Demokrat terkait penambahan anggaran untuk Koperasi Merah Putih. Bagaimana?
Fraksi Demokrat mendukung penuh terhadap peningkatan anggaran dan penguatan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sampai tahun 2026 ini jalan. Jika Koperasi Merah Putih berjalan akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Bisa menjembatani antara produsen kecil, para petani, para peternak, nelayan, dengan konsumen. ■ REN